

PENERAPAN PENDIDIKAN BUDI PEKERTI SEBAGAI PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA DI SEKOLAH: SEBUAH FENOMENA DAN REALITAS

Sutiyono
FBS Universitas Negeri Yogyakarta
e-mail: sutiyono_63@yahoo.com

Abstrak: Tulisan ini hendak melihat pendidikan budi pekerti untuk membentuk karakter siswa di sekolah masih dalam persimpangan jalan. Pengembangan karakter siswa diperlukan untuk membentuk mata pelajaran budi pekerti. Pendidikan yang selama ini dialami siswa di sekolah masih bersifat kognitif. Padahal, untuk dapat mewujudkan hasil didikan yang maksimal, siswa haruslah memiliki pengetahuan secara intelektual dan pendidikan budi pekerti untuk membangun karakter bangsa. Penerapan pendidikan budi pekerti di sekolah menjadi amat penting untuk membangun karakter bangsa. Namun, permasalahannya pendidikan budi pekerti di Indonesia baru menyentuh pada tahap pengenalan dan pemahaman nilai-nilainya. Selain itu, berbagai peristiwa seperti korupsi, budaya kurang santun, tawuran dan kekerasan, konflik horizontal di masyarakat adalah suatu kenyataan yang harus disikapi agar sekolah-sekolah di Indonesia menerapkan pendidikan budi pekerti untuk membentuk karakter siswa.

Kata Kunci: *pendidikan budi pekerti, pembentukan karakter, fenomena, realitas*

THE IMPLEMENTATION OF MORAL EDUCATION AS SCHOOL STUDENTS' CHARACTER BUILDING: A PHENOMENON AND REALITY

Abstract: This paper aims to view moral education to shape the character of the school students which is still in controversy. The development of the students' character is needed in moral education. The school education the students have experienced so far is still cognitive in nature. In order to achieve a maximum result of education, the students should have intellectual knowledge and moral education to build the nation's character. The implementation of moral education at school becomes very important to build the nation's character. However, the problem is that the moral education in Indonesia has only touched the introduction and the comprehension of its values. Besides, various phenomena such corruption, impolite culture, brawls and violations, and horizontal conflicts in the community are realities that must be dealt with so that schools in Indonesia implement moral education to build the students' character

Keywords: *moral education, character building, phenomena, reality*

PENDAHULUAN

Tampaknya pendidikan budi pekerti di Indonesia masih dalam persimpangan jalan. Tidak sedikit orang yang mengidealkan pendidikan budi pekerti, tetapi kenyataannya masih banyak masalah yang dihadapi bangsa. Sementara itu, disusunnya mata pelajaran budi pekerti yang diajarkan di semua tingkatan sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, pembelajarannya masih tetap cenderung mengarah pada satu ranah kognitif saja.

Terlebih dengan masuknya muatan mata pelajaran teknologi dan informasi yang dipelajari, pendidikan budi pekerti ini telah banyak ditinggalkan oleh sekolah.

Saat ini, terlihat usaha untuk membangun pendidikan karakter dengan mengembangkan nilai-nilai budi pekerti di sekolah pada ranah struktur aparatur pemerintah menuju menyatunya antara pendidikan dan kebudayaan, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Hal ini disebabkan adanya reduksi

besar-besaran terhadap arti pendidikan dan kebudayaan, yaitu pemisahan antara pendidikan dan kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan dan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Dengan mengatasnamakan Kemendikbud, tidak hanya pendidikan saja yang menjadi tumpuan utama, akan tetapi persoalan kebudayaan juga benar-benar dipertimbangkan secara matang. Tetapi, hingga sekarang belum terlihat bagaimana sekolah menerapkan pendidikan karakter untuk mengembangkan nilai-nilai budi pekerti di sekolah secara terpadu. Sementara itu, disusunnya mata pelajaran budi pekerti yang diajarkan di semua tingkatan pendidikan pada desain pembelajarannya masih tetap cenderung mengarah pada satu ranah kognitif saja. Bahkan, sejalan dengan syaratnya muatan teknologi dan ilmu yang dipelajari, pendidikan budi pekerti ini telah banyak ditinggalkan oleh sekolah.

Sementara itu, pendidikan masih direduksi menjadi suatu lembaga yang mengharuskan cara mendidiknya berbasis kompetensi untuk dipersiapkan menjadi manusia dalam kerangka mekanisme pasar. Hal ini tidak berbeda dengan sekolah pada masa kolonial, yang tujuannya untuk mengisi atau menjadi pegawai yang mengabdikan pada kepentingan pemerintah Belanda. Karena ditujukan untuk kepentingan pasar, mekanisme proses pembelajarannya hanya tertuju pada bentuk penguasaan ilmu dan disiplin tertentu tanpa mempertimbangkan budaya. Dengan kata lain, dijadikannya pendidikan sebagai bagian dari komoditas perdagangan pasar dunia, kondisi pendidikan karakter yang berbasis budaya seperti pengembangan nilai-nilai budi pekerti saat ini cukup memprihatinkan.

Pendidikan yang tidak didasari oleh aspek kebudayaan akan menghasilkan generasi yang tercerabut dari kehidupan ma-

syarakatnya sendiri. Menjadikan pendidikan yang steril dari kekayaan budayanya sendiri berpotensi menghasilkan keterasingan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebudayaan yang tidak menyatu dengan pendidikan akan cenderung asing bagi kehidupan dan mulai ditinggalkan oleh masyarakatnya sendiri.

Banyak kalangan yang menyebutkan bahwa pendidikan karakter di Indonesia sampai saat ini belum berhasil. Bahkan, beberapa kalangan menyatakan pendidikan karakter dinyatakan gagal karena banyak peristiwa kekerasan dan kerusakan di berbagai daerah. Sementara itu, disusunnya mata pelajaran budi pekerti yang diajarkan di semua tingkatan pendidikan pada desain pembelajarannya masih tetap cenderung mengarah pada satu ranah kognitif saja. Bahkan, sejalan dengan syaratnya muatan teknologi dan ilmu yang dipelajari pendidikan budi pekerti ini telah banyak ditinggalkan oleh sekolah.

PENDIDIKAN BUDI PEKERTI DAN FENOMENANYA

Akhir-akhir ini istilah budi pekerti menjadi hangat dibicarakan oleh berbagai kalangan, mulai dari lembaga tinggi negara hingga kalangan akar rumput. Hal ini disebabkan banyaknya perilaku yang menyimpang atau melanggar hukum mulai dari pejabat pemerintah hingga masyarakat bawah, mulai dari soal korupsi hingga kekerasan yang sampai berdarah-darah. Budi pekerti sering diartikan sebagai moralitas yang mengandung pengertian antara lain adat istiadat, sopan santun, dan perilaku (Sedyawati, 1997:5). Sebagai perilaku, budi pekerti meliputi pula sikap yang dicerminkan oleh perilaku itu. Sikap dan perilaku itu menyatu dalam bentuk tindakan nyata yang dianggap baik bagi diri sendiri dan orang lain.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa budi pekerti diartikan sebagai 'tingkah laku, akhlak dan watak'. Budi merupakan alat batin yang memandu akal dan perasaan untuk menimbang baik buruk, benar-salah, watak, perbuatan, daya-upaya dan akal sehingga menentukan kualitas diri seseorang yang tercermin dalam ucapan dan perbuatannya. Pekerti berkaitan erat dengan sikap dan perilaku dalam hubungan seseorang dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan alam sekitar.

Budi sering diartikan sebagai nalar, pikiran, akal. Inilah yang membedakan manusia dan hewan. Budi inilah yang mempersatukan kita semua sebagai manusia, entah mereka itu dari suku, golongan, kelompok, atau umur apa pun. Sejauh mereka adalah manusia, mereka mempunyai kesamaan budi. Selanjutnya, dengan nalar itulah orang berpekerti atau bertindak baik. Oleh karena itu, pelajaran budi pekerti menjadi pelajaran tentang etika hidup bersama untuk bertindak baik yang berdasarkan nalar. Ada unsur kesadaran dan ada unsur melaksanakan kesadaran tersebut (Suparno, 2002:28).

Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa budi pekerti berkaitan erat dengan adab yang menunjukkan sifat batin manusia, misalnya keinsyafan tentang kesucian, kemerdekaan, keadilan, ketuhanan, cinta kasih dan kesosialan. Kata adab (budaya) dalam hal ini menjadi kata kunci bahwa segala tindakan manusia harus terpandu oleh adab yang dimiliki oleh yang bersangkutan (Dwiwarso, 2010).

Visi Departemen Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Rencana Strategis Depdiknas Tahun 2005-2009, Menuju Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2025 menyebutkan bahwa nilai-nilai budi pekerti antara lain meliputi: adil,

amanah, antisipatif, baik sangka, bekerja keras, beradab, berani berbuat benar, berpikir jauh ke depan, bersahaja, bersemangat, bijaksana, cerdas, cermat, cinta ilmu, dedikasi, demokratis, dinamis, disiplin, efisien, efektif, empati, gigih, giat, hemat, hormat, hati-hati, harmonis, iman, ikhlas, *istighfar*, inisiatif, inovatif, jujur, kasih sayang, keras kemauan, ksatria, komitmen, konstruktif, konsisten, kooperatif, kreatif, lapang dada, lemah lembut, lugas, mandiri, manusiawi, mawas diri, menghargai, menjaga, nalar (logis), optimis, patriotik, pe-maaf, pemurah, pengabdian, pengendalian diri, percaya diri, produktif, proaktif, rajin, ramah, rasa indah, rasa malu, rasional, rela berkorban, rendah hati, sabar, saleh, setia, sopan santun, sportif, susila, syukur, takwa, taat, teguh, tangguh, tanggung jawab, tawakal, tegar, tegas, tekun, tenggang rasa, terbuka, tertib, terampil, tekun, tobat, ulet, unggul, wawasan luas, wirausaha, dan yakin.

Sejak Indonesia merdeka, para pendiri bangsa (*founding fathers*) telah memikirkan pendidikan budi pekerti sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi ikut mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan pada sila-sila dalam Pancasila. Namun, pada tahun 1970-an pendidikan budi pekerti dihilangkan. Dampak dari penghilangan pendidikan budi pekerti adalah akibat yang harus ditanggung bangsa Indonesia baru terasa kurang lebih 30 tahun berikutnya yang berupa bermacam-macam kasus KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Masyarakat kembali bereaksi dan melakukan tuntutan untuk mengembalikan pendidikan budi pekerti yang telah dihilangkan pada tahun 1970-an. Kemudian pendidikan budi pekerti dicanangkan kembali tahun 1994.

Dalam hal ini, pendidikan budi pekerti yang dimaksud adalah yang secara

integratif menyatu dengan mata pelajaran (*integrated learning*). Sampai pada tahun 2000, pendidikan budi pekerti bergema ke seluruh tanah air setelah dilaksanakan suplemen kurikulum. Tahun 2000 Dikdasmen Jakarta menerbitkan Buku I dan II yang berisi pendidikan budi pekerti dan disusul tahun 2002 Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas Jakarta juga menerbitkan seri Pendidikan Budi Pekerti untuk tingkat SD hingga SLTA yang termuat dalam salah satu seri Kurikulum Berbasis Kompetensi. Sayang, buku-buku tersebut tidak menyajikan cara pembelajaran yang strategis guna mencapai tujuan pendidikan budi pekerti. Hasil yang ditunggu-tunggu hingga kini belum tampak tanda-tanda keberhasilan pendidikan budi pekerti. Buktinya, di lapangan banyak dijumpai fenomena perilaku menyimpang dari tatanan sosial. Betapa memilukan jika kita merenungi berita tentang kriminal dan kekerasan dari media, baik cetak maupun elektronik. Akankah pengalaman kegagalan pendidikan budi pekerti yang mulai dicanangkan kembali pada tahun 1994 menjadi lagu wajib yang memilukan? Di manakah letak fenomena dan kebuntuan saluran pendidikan budi pekerti itu?

Apa yang disebut dengan pendidikan etika, akhlak, moral serta nilai budi pekerti bagi semua warga negara adalah penting kiranya tidak perlu diperdebatkan. Jika warga negara dapat menjaga nilai-nilai budi pekerti yang diharapkan, maka negara akan menjadi utuh dan kuat di mata orang asing. Tetapi sebaliknya, jika warga negara terlebih pejabat dan rakyatnya berperilaku tidak bermoral, maka negara atau suatu bangsa bisa runtuh. Contoh berperilaku tidak bermoral ialah melakukan kerusuhan, keonaran, penyimpangan dan lain-lain yang menyebabkan kehancuran suatu bangsa. Mereka tidak memiliki

pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan hal tersebut, nilai-nilai budi pekerti perlu diajarkan di sekolah agar generasi sekarang dan yang akan datang mampu berperilaku sesuai dengan moral yang diharapkan menuju terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang bermoral, berkarakter, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur merupakan tujuan dari pembangunan manusia Indonesia yang kemudian dicanangkan ke dalam tujuan pendidikan nasional.

Budi pekerti adalah harta yang tiada terkira. Bahkan, budi pekerti bukan lagi harta yang seperti sekarang ini diartikan. Ia merupakan modal sosial (*social capital*) bangsa. Budi pekerti merupakan fitrah baik manusia yang dapat membedakan antara manusia dan bukan manusia. Sebab, budi pekerti harus selalu disemai jika manusia masih dan selalu mendamba hidup damai dan bermartabat di mata manusia lainnya dan terutama Tuhan. Hal ini juga sesuai dengan yang dilontarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dalam kesempatan pidato Hari Pendidikan Nasional 2012 mengangkat tema Bangkitnya Generasi Emas Indonesia. Beliau menjelaskan pada periode tahun 2010 sampai tahun 2035 kita harus melakukan investasi besar-besaran dalam bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai upaya menyiapkan generasi emas 2045, yaitu 100 tahun Indonesia merdeka. Artinya, jika mulai sekarang sudah dimulai penerapan pendidikan karakter untuk mengembangkan nilai-nilai budi pekerti, itu artinya sama dengan kita melakukan investasi masa depan bangsa.

Pendidikan yang teratur adalah yang bersandar pada perkembangan ilmu pengetahuan atau ilmu pendidikan. Ilmu ini tidak boleh berdiri sendiri; ada saling hu-

bungan dengan pengetahuan lain. Ilmu harus berfungsi sebagai pelengkap sempurna mutu pendidikan dan pembangunan karakter kebangsaan yang kuat. Dalam menyelenggarakan pengajaran dan pendidikan kepada rakyat, Ki Hajar Dewantara menganjurkan agar kita tetap memperhatikan ilmu jiwa, ilmu jasmani, ilmu keadaban dan kesopanan (etika dan moral), ilmu estetika, dan menerapkan cara-cara pendidikan yang membangun karakter (Amoersetya, 2012). Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa seorang pendidik yang baik harus tahu bagaimana cara mengajar, memahami karakter peserta didik dan mengerti tujuan pengajaran. Agar dapat mewujudkan hasil didikan yang mempunyai pengetahuan yang mumpuni secara intelektual maupun budi pekerti untuk membangun bangsa.

PENGETRAPAN PENDIDIKAN BUDI PEKERTI

Dalam rangka mengembangkan karakter peserta didik memang diperlukan upaya untuk membentuk mata pelajaran budi pekerti. Pendidikan budi pekerti yang dimaksud adalah pendidikan (berupa mata pelajaran) yang secara khusus mendidik budi pekerti kepada peserta didik. Tampaknya sulit untuk diterapkan. Dalam arti, agar dapat menjawab tantangan pendidikan karakter, caranya adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai budi pekerti ke dalam kandungan kurikulum. Setiap karakter yang akan dikembangkan harus terwujud di dalam kandungan setiap mata pelajaran. Wujudnya dapat melalui tugas-tugas dan pekerjaan rumah, bahan kajian, simulasi, dan juga terwujud di dalam peraturan akademik yang lain.

Melalui cara ini, peserta didik akan terlatih secara terpola, yang menjadikan peserta didik terbiasa untuk berbuat ke-

baikan terhadap sesama. Pendidikan karakter kini memang menjadi isu utama pendidikan sekarang. Tugas-tugas dan pekerjaan rumah, bahan kajian, simulasi menggiring para peserta didik untuk membangun kelompok sehingga dapat berbagi dengan temannya. Sebagai bagian dari proses pembentukan karakter anak bangsa, pendidikan budi pekerti juga diharapkan mampu menjadi fondasi utama dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, menanamkan nilai-nilai budi pekerti pada peserta didik dirasa sangat penting selain mengajarkan aspek kognitif.

Pendidikan budi pekerti merupakan pilar yang amat penting untuk membangun karakter bangsa. Namun, kekurangannya pendidikan budi pekerti di Indonesia baru menyentuh pada tahap pengenalan dan pemahaman nilai-nilainya. Padahal, pendidikan budi pekerti seharusnya dilakukan pada tahapan internalisasi dan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lickona (1991) menyebutkan pentingnya diperhatikan tiga unsur dalam menanamkan nilai moral supaya sungguh terjadi, yaitu unsur pengertian, perasaan, dan tindakan moral. Ketiga unsur ini saling berkaitan. Ketiga unsur ini perlu diperhatikan supaya nilai yang kita tanamkan tidak tinggal sebagai pengetahuan saja, tetapi sungguh menjadi tindakan seseorang. Unsur pengertian moral menyangkut peserta didik dibantu untuk mengerti apa isi nilai yang digeluti dan mengapa nilai itu harus dilakukan dalam kehidupan mereka.

Dengan demikian, peserta didik sungguh mengerti apa yang akan dilakukan dan sadar akan apa yang dilakukan. Unsur perasaan moral meliputi peserta didik dibantu untuk menyenangi ataupun mengiyakan nilai yang hendak dilakukan. Peserta didik dibantu untuk menjadi lebih

tertarik akan nilai tersebut. Peserta didik dibantu untuk dapat merasakan bahwa nilai itu sungguh baik dan perlu dilakukan. Unsur tindakan moral meliputi peserta didik perlu dibantu untuk dapat melakukan nilai budi pekerti yang telah disadari dalam wujud tindakan nyata. Peserta didik perlu dibantu untuk memunyai kemauan melakukan nilai tersebut. Ia menyimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah usaha sengaja untuk menolong orang agar memahami, peduli akan, dan bertindak atas dasar nilai-nilai etis.

Pendidikan karakter bisa diartikan sebagai sebuah bantuan sosial agar individu itu dapat bertumbuh dalam menghayati kebebasannya dalam hidup bersama dengan orang lain. Pendidikan karakter bertujuan membentuk setiap pribadi menjadi insan yang memiliki keutamaan. Dalam lingkup pendidikan ini tidak hanya berurusan dengan penanaman nilai bagi peserta didik. Namun, merupakan sebuah usaha bersama untuk menciptakan sebuah lingkungan pendidikan, yang menempatkan setiap individu dapat menghayati kebebasannya sebagai sebuah prasyarat bagi kehidupan moral yang dewasa. Dengan demikian, pendidikan karakter dapat dilihat sebagai usaha manusia untuk menciptakan kultur kehidupan yang mendukung pertumbuhan individunya secara autentik (Koesoema, 2007:22).

Pengembangan karakter adalah suatu pendekatan holistik yang menghubungkan dimensi moral pendidikan dengan ranah sosial dan sipil dari kehidupan peserta didik. Sikap dan nilai dasar dari masyarakat diidentifikasi dan diteguhkan dalam lingkup sekolah dan komunitas. Pendidikan karakter bersifat sarat nilai, karena masyarakat menentukan apa-apa yang akan dan tidak akan diteladani. Moral ditangkap bukan diajarkan dan kehidupan

ruang kelas sinkron dengan makna moral yang membentuk karakter peserta didik dan perkembangan moral (Ryan, 1996:75). Cakupan pendidikan karakter meliputi aspek kognitif, afektif, dan perilaku moral yang dialami individu, baik sebagai individu maupun warga negara yang baik. Oleh karena itu, sekolah bertanggung jawab untuk memberikan bantuan terhadap anak didik dalam menguasai moralitas dan kebangsaan sehingga menjadi warga negara yang baik (Lickona, 2002).

Melalui proses pendidikan, terutama pendidikan formal di sekolah, peserta didik dapat dibantu untuk mengerti nilai karakter yang diharapkan, dan pelan-pelan membantu mereka untuk melatih dan menjadikan nilai itu sebagai sikap hidup mereka. Untuk mewujudkannya diperlukan pembiasaan sehingga nilai itu menjadi nilai yang spontan di jalan anak. Sekolah formal memiliki tanggung jawab besar terhadap pendidikan karakter ini, karena anak minimal berada di sekolah enam jam setiap hari. Mereka dipercayakan oleh orang tua kepada sekolah untuk dididik dan dibantu berkembang menjadi pribadi yang utuh (Suparno, 2012:5).

SEBAGAI PEMBENTUK KARAKTER: HARUS DILAKUKAN

Untuk menjawab permasalahan pendidikan budi pekerti untuk membentuk karakter siswa harus dipikirkan secara serius agar proses bersekolah yang dialami para peserta didik dapat menghasilkan karakter bangsa yang baik. Salah satunya adalah pendidikan karakter dirancang dengan cara diintegrasikan ke dalam kandungan kurikulum tertulis, kurikulum yang tidak tertulis (*hidden curriculum*), serta kegiatan kokurikulum dan ekstrakurikuler. Artinya, karakter yang ingin dikembangkan harus terwujud di dalam kandungan

setiap mata pelajaran melalui proses pembelajaran di kelas, tugas di luar kelas, dan juga terwujud di dalam peraturan sekolah.

Perlu diketahui bahwa desain pembelajaran budi pekerti semestinya tidak diatasnamakan mata pelajaran budi pekerti. Namun, aplikasi nilai-nilai budi pekerti itu terserap sebagai muatan di setiap aktivitas pembelajaran yang sudah dirancang. Dengan demikian, setiap mata pelajaran dapat bermuatan nilai-nilai budi pekerti. Oleh karena itu, pendidikan karakter untuk mengembangkan nilai budi pekerti ini tentu saja tidak dapat berhasil dalam waktu yang singkat. Misalnya, langsung dapat dilihat melalui bentuk spot mata pelajaran di awal, di tengah, ataupun di akhir saja. Di samping itu, juga jangan diharapkan langsung dapat berhasil dalam satu mata pelajaran. Pendidikan karakter yang hanya menekankan pada satu atau dua mata pelajaran saja tidak akan dapat menjamin tercapainya karakter peserta didik yang diinginkan. Dengan demikian, pendidikan karakter harus berjalan sesuai dengan proses yang menyeluruh dan berkelanjutan. Selama kurikulum ini diterapkan, kandungan dan muatan pendidikan karakter akan juga tetap dilaksanakan.

SK Mendiknas No 045/U/Mendiknas/2002 tentang pelaksanaan kurikulum di PT merupakan satu contoh yang tepat dalam usaha pengembangan karakter. Di dalam SK itu, disyaratkan bahwa tujuan akhir pendidikan adalah membentuk lulusan yang berkarakter dan berkepribadian kuat harus tertuang di dalam kurikulum serta dilakukan secara simultan dalam aspek kegiatan belajar mengajar. Tetapi, untuk membentuk karakter seseorang tidak cukup hanya mengandalkan dari hasil belajar di sekolah saja. Pihak sekolah perlu menjalin kerja sama antara sekolah, ke-

uarga, dan masyarakat di dalam pengembangan karakter. Dalam arti tidak bisa pendidikan karakter hanya dikembangkan di sekolah saja, tetapi juga di dalam lingkup keluarga dan lingkungan masyarakat.

Institusi pendidikan dan keluarga merupakan garda depan yang lebih berperan dalam penyemaian budi pekerti yang baik. Kedua intitusi inilah yang seharusnya memunyai waktu lebih untuk bisa menanamkan nilai budi pekerti pada peserta didik atau anggota keluarganya. Bagaimanapun sekarang ini, pengaruh "dunia luar" yang bertentakel liar kini getol menginjeksikan budaya yang tanpa seleksi karena visinya adalah "pasar" dan berdagang. Dapat dilihat tayangan TV setiap hari yang isinya penawaran barang dagangan dan film-film yang sama sekali tidak mendidik, bahkan yang ada kaitannya dengan nilai-nilai budi pekerti dibuang. Di sinilah peran institusi pendidikan dan keluarga menjadi penyeimbang moral san anggota. Jangan sampai institusi pendidikan malah ikut-ikutan sebagai tempat penyemai dan pengiklan gaya baru berpakaian. Sekolah bukanlah *catwalk* di mana peragaan busana berlangsung.

Lembaga pendidikan memiliki tugas mempersiapkan terbentuknya individu-individu yang cerdas dan berakhlak mulia. Terbentuknya dua kriteria ini memungkinkan terwujudnya kehidupan sosial yang ideal, yang diwarnai semangat mengembangkan potensi diri dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin serta keselamatan dunia akherat (Zuchdi, 2008:141). Dengan kata lain, lembaga pendidikan dalam konteks ini diharapkan dapat menghasilkan terbentuknya manusia yang memiliki budi pekerti yang baik. Dalam hal ini, pendidikan budi pekerti dapat dipandang sebagai proses pembentukan manusia yang bermuara

pada aspek kecerdasan dan sosialitas yang bermuara pada aspek akhlak mulia.

Selain itu, perlu pembelajaran tetap bersandar pada empat pilar pendidikan yang digariskan oleh UNESCO secara terpadu yaitu *learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together*. Dengan mengetahui pendidikan budi pekerti secara eksplisit, guru dan pembelajar lebih mudah dalam memahami materi pendidikan budi pekerti (*learning to know*). Setelah terjadi internalisasi (pemahaman diri terhadap budi pekerti), guru menciptakan kondisi yang menuntut para peserta didik untuk melakukan dan mempraktikkan pendidikan budi pekerti (*learning to do*). Jadi, kondisi itu sengaja diciptakan oleh guru. Maka, guru perlu mengemas pendidikan karakter untuk mengembangkan budi pekerti dengan bentuk dan strategi yang menarik peserta didik sesuai dengan perkembangan jiwanya hingga mereka tidak mudah tergoda budaya maya yang tiada berguna. Dari sinilah awal jatidiri (*learning to be*) mulai terbentuk, yaitu jati diri dalam koridor budi pekerti. Biarkan mereka dengan caranya sendiri menggali pendidikan budi pekerti.

BERHADAPAN DENGAN REALITAS

Pendidikan karakter kini memang menjadi isu utama pendidikan. Sebagai bagian dari proses pembentukan akhlak anak bangsa, pendidikan karakter juga diharapkan mampu menjadi pondasi utama dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, menanamkan pendidikan karakter dengan mengembangkan nilai-nilai budi pekerti pada peserta didik dirasa sangat penting selain mengajarkan aspek kognitif. Ditegaskan pula dalam Visi Departemen Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Rencana Strategis Depdiknas Tahun 2005-2009, Menuju Pembangunan

Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2025, bahwa "*Pembangunan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berfungsi sebagai subyek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal*". Sesuai dengan amanat peraturan perundangan tersebut, idealnya seluruh komponen tenaga pendidikan pada semua jenjang dan jenis lembaga pendidikan apapun hendaknya mengupayakan terciptanya pribadi-pribadi yang memiliki karakter *adiluhung*, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti terpuji.

Oleh karena itu, diperlukan kesatuan pandangan, persepsi dan komitmen semua pihak terkait dengan bidang pendidikan yang didukung oleh tekad yang kuat, kebijakan yang konsisten, pelaksanaan yang konsekuen didukung oleh sarana prasarana yang memadai. Salah satu hal yang sangat mendasar demi tercapainya tujuan dan cita-cita di atas adalah keteladanan pemimpin, guru, orang tua dan pembiasaan peserta didik berbudi pekerti luhur sejak usia dini.

Sedyawati (1997) mengemukakan bahwa banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelanggaran hukum paling banyak dilakukan oleh remaja. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran hukum atau pun perilaku yang menyimpang dari tatanan sosial justru dilakukan oleh orang-orang yang sedang mencari ilmu di sekolah, bukan orang-orang yang sudah berumah tangga meskipun tidak sedikit yang berperilaku menyimpang. Dalam arti, bahwa kondisi moralitas remaja sebagai peserta didik yang lemah dan perlu mendapatkan bimbingan dan pembinaan yang intensif dari orang dewasa di sekitarnya. Kondisi remaja yang lemah merupakan gambaran fondasi moral yang rapuh di masa masa kanak-kanak. Pembinaan budi

pekerti yang kuat sejak dini akan membekali para remaja di kemudian hari.

Tetapi, sekarang ini kita dihadapkan pada realitas, yaitu minimnya keteladanan dari para pemimpin, pejabat, wakil rakyat, hakim, guru, dan orang tua. Rasanya mencari keteladanan seseorang di zaman sekarang sangat sulit mengingat banyaknya perilaku anomali (penyimpangan) yang merebak di tanah air. Taruhlah misalnya praktik korupsi besar-besaran baik untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau golongan di lingkungan birokrasi dan partai politik, merupakan pelanggaran etika serta hilangnya karakter bangsa. Hal ini bukti minimnya pendidikan budi pekerti sejak di sekolah.

Negara kita yang disebut-sebut orang memiliki nilai-nilai luhur, ternyata hubungan kekerabatan dan persaudaraan sudah mulai hancur. Setiap warga berlomba mengkhianati negerinya atau temannya; kepercayaan mutual lenyap karena sumpah dan keimanan disalahgunakan; hukum atau institusi lumpuh tak mampu meredam perluasan korupsi; yang muda malas yang tua gatal; kedua jenis dari segala umur penuh budaya jorok. Ketamaan dan hasrat meraih kehormatan rendah merajalela. Akhirnya, timbul kematian dan pengasingan: kebaikan dimusuhi, kejahatan diagung-agungkan. Akibatnya, kebajikan dasar kehidupan berbangsa seperti sipilitas, responsibilitas, keadilan, dan integritas runtuh (Latif, 2007:38).

Kemorosotan moral sekilas selalu dikaitkan dengan perilaku fisik yang menyimpang seperti tawuran, aksi porno, hujatan, dan lain sebagainya. Identifikasi ini tidak tepat, sebab jika gejala kemorosotan moral hanya dibatasi perilaku yang tampak pada mata maka gejala yang lebih halus dan licik akan aman dari kecaman masyarakat. Padahal, untuk sekarang gejala

yang halus dan licik itu begitu banyak dan bersinggungan dengan kita. Lihatlah perilaku korupsi, menipu, gendam, percaloan, sogok-menyogok dan sebagainya merupakan perilaku yang tak tampak mata, tetapi daya rusaknya lebih berkepanjangan dirasakan. Bahkan, akhir-akhir ini kita kerap dipertontonkan dengan fenomena kekerasan baik yang terjadi di dunia pendidikan, pentas politik, dan kehidupan bermasyarakat di sekitar kita. Peserta didik menunjukkan borok dunia pendidikan kita yang makin jauh dari budi pekerti. Pun, tak terhitung banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di sekitar kita, tak terkecuali di rumah.

Pendek kata, berbagai peristiwa seperti korupsi yang begitu meluas dan menggila, budaya kurang santun dalam mengungkapkan perbedaan pendapat seperti sering dilihat dalam sidang DPR, *tawuran* dan kekerasan di lingkungan pendidikan menengah dan PT, konflik horizontal di masyarakat yang sering memakan banyak korban jiwa. Selain itu, tantangan globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan juga menuntut disikapi dengan karakter yang lebih kuat. Itulah sebabnya peristiwa akhir-akhir ini dapat mengkhawatirkan kehidupan bangsa telah menjadi penyebab mendesakkan dihidupkan kembali pembangunan karakter bangsa (Suparno, 2012:1).

Namun, nilai-nilai budi pekerti di atas mudah untuk diucapkan tapi sulit diamalkan. Seorang pendidik untuk menjelaskan nilai-nilai tersebut di atas tidak memerlukan waktu yang relatif lama, satu atau dua kali tatap muka dengan peserta didik dapat dengan mudah menjelaskannya. Tetapi, apabila nilai-nilai budi pekerti tersebut di atas ingin nampak dalam kepribadian sehari-hari memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk merealisasikan-

nya memerlukan manajemen dalam arti memanfaatkan dan memberdayakan segala sumber daya manusia dan benda secara efektif, efisien, kontinyu dan konsisten.

Implementasi manajemen sekolah berwawasan budi pekerti hendaknya dilaksanakan dengan pendekatan integral sistemik. Perangkat-perangkat yang ada meliputi perangkat keras (*hardware*) seperti sarana dan prasarana sekolah, perangkat lunak (*software*) seperti kurikulum, media pembelajaran, dan perangkat pikir (*brainware*) seperti kemampuan pengembangan pemikiran, tidak bisa berdiri sendiri, terpisah satu dengan lainnya, tetapi semuanya harus saling terkait dan saling mendukung. Bila ketiga perangkat tersebut tidak disinergikan dan bersifat parsial, maka penanaman nilai-nilai budi pekerti dalam kepribadian sehari-hari pada peserta didik sulit direalisasikan.

Berhasil tidaknya membentuk kepribadian peserta didik yang memiliki akhlak mulia dan berbudi pekerti luhur sangat tergantung pada niat, tekad dan kesungguhan serta keikhlasan dari semua pihak: Kepala Sekolah, guru, dan *stakeholder* lainnya (orang tua, masyarakat dan pemerintah). Perlu kiranya semua pihak mengakui bahwa dewasa ini kepribadian peserta didik sangat memprihatinkan, sulit kita menemukan para peserta didik dari mulai peserta didik TK sampai mahapeserta didik di Perguruan Tinggi yang memiliki akhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, bahkan sebaliknya terlalu banyak kita saksikan generasi muda kita yang mengalami dekadensi moral.

Kondisi ini perlu perhatian serius dari semua pihak dan harus dicari solusi untuk mengatasinya. Harus kita yakini bersama bahwa kehancuran kehidupan masyarakat suatu bangsa penyebab utamanya adalah kehancuran akhlak dan moral ma-

syarakat bangsa tersebut. Sebelum negara kita mengalami kebangkrutan marilah kita antisipasi dengan cara semua pihak: sekolah, masyarakat, dan aparat pemerintah berusaha menjadi teladan bagi generasi penerus bangsa. Kita warisi mereka dengan nilai-nilai akhlak mulai dan budi pekerti luhur. Seluruh komponen bangsa tidak boleh berpangku tangan dan apatis menyaksikan fenomena nilai-nilai akhlak mulia yang semakin sirna dalam kehidupan nyata.

Selain itu, untuk mencapai tujuan mulia di atas jelas tidak mudah, apalagi pada era di mana mayoritas masyarakat cenderung lebih mementingkan hal-hal yang bersifat materialistik dan hedonistik. Upaya untuk mencapai tujuan mulia di atas sungguh sangat berat dan sulit. Tetapi bagaimana pun pendidikan budi pekerti harus dilakukan, dari pada terlambat, sementara perilaku menyimpang semakin hari jumlahnya tidak semakin sedikit, tetapi jumlahnya semakin banyak.

PENUTUP

Pengetrapan pendidikan budi pekerti untuk mengembangkan karakter di sekolah yang dimaksud adalah proses pendidikan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai budi pekerti ke dalam kandungan kurikulum. Setiap karakter yang akan dikembangkan harus terwujud di dalam kandungan setiap mata pelajaran. Wujudnya dapat melalui tugas-tugas dan pekerjaan rumah, bahan kajian, simulasi, dan juga terwujud di dalam peraturan akademik yang lain di sekolah. Melalui cara ini, peserta didik akan terlatih secara terpolo, yang menjadikan peserta didik terbiasa untuk berbuat kebaikan terhadap sesama. Sebagai bagian dari proses pembentukan karakter anak bangsa, pendidikan budi pekerti juga diharapkan mampu menjadi

pondasi utama dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Namun demikian, pendidikan budi pekerti untuk membentuk karakter siswa di sekolah masih dalam persimpangan jalan antara fenomena dan realitas di lapangan. Secara fenomenal, dalam pendidikan budi pekerti itu sendiri masih banyak dijumpai kejanggalan mulai dari merencanakan hingga menerapkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Sejak Indonesia merdeka para pendiri bangsa telah memikirkan pendidikan budi pekerti, tetapi 1970-an pendidikan budi pekerti dihilangkan, dampaknya banyak perilaku menyimpang. Masyarakat kembali bereaksi dan melakukan tuntutan untuk mengembalikan pendidikan budi pekerti yang dicanangkan kembali tahun 1994 yang hingga sekarang pengetrapannya di lapangan belum tertata dengan baik.

Realitasnya, kita dihadapkan pada minimnya keteladanan dari para pemimpin, pejabat, wakil rakyat, hakim, dan orang tua. Bahkan, dari pihak guru itu sendiri juga terjadi krisis keteladanan, yang berarti sulit ditiru oleh para siswa. Misalnya, praktik korupsi besar-besaran baik untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau golongan di lingkungan birokrasi dan partai politik, merupakan pelanggaran etika serta hilangnya karakter bangsa. Realitas ini menjadi bukti minimnya pendidikan budi pekerti sejak di sekolah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, diucapkan banyak terima kasih kepada Ki Hajar Dewantara (almarhum), Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yang gagasannya banyak penulis pelajari dan memberikan inspirasi untuk tulisan ini. Di samping itu, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada Editor *Jurnal Pendidikan Karakter* yang banyak

memberikan masukan demi sempurnanya tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amoersetya, Rusdiyanto Alit. 2012. *Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang Pendidikan Nasional*. <http://www.berdikarionline.com/opini/20120609/>.
- Dwiarsa, Priya. 2010. "Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kearifan Lokal di Perguruan Tamansiswa". Makalah Dipresentasikan dalam Seminar Nasional *Implementasi Pendidikan Karakter dalam Praksis Pendidikan dan Pembelajaran*, 20 November. Yogyakarta: PHK-I UNY.
- Koesoema, Doni. 2007. "Tiga Matra Pendidikan Karakter". *Basis*, No. 07 - 08., hlm. 22.
- Latif, Yudi. 2007. "Hancur Karakter Hancur Bangsa Urgensi Pendidikan Karakter". *Basis*, No. 07 - 08., hal. 38.
- Lickona, Thomas. 1991. *Educating for Character: How Our School can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Lickona, Thomas. dkk. 2002. *Eleven Principles of Effective Character Education*. Washington DC: Character Education Partnership.
- Ryan, K. 1996. "Charakter Education in the United States". *Journal for A Just And Caring Education*, No. 2., hlm. 75-84.
- Sedyawati, Edy dkk. 1997. *Pedoman Penanaman Budi Pekerti Luhur*. Jakarta: Balai Pustaka.

Suparno, Paul dkk. 2002. *Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Kanisius.

Suparno, Paul dkk. 2012. "Peran Pendidikan dan Penelitian terhadap Pembangunan Karakter Bangsa". *Makalah Seminar Nasional* dalam rangka Dies Natalis ke-48 Universitas Negeri Yogyakarta.

Zuchdi, Darmiyati. 2008. *Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan Yang Manusiawi*. Jakarta: Bumi Aksara.